KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NHDANUHG

## BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

	The state of the s									
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			H.1 H.2					H.4 X Final H.5 Tidak Final		
A. IDI	ENTITAS PE	NERIMA PENGHASIL	AN YANG	DIPOTONG						
A.1 N	A.1 NPWP : 68 807 601 7 722 000									
A.2 NIK :										
A.3 Nama : PRIMIATY ANGGRAENY										
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG										
MASA PAJAK (mm-yyyy)		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)		DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)		
B.1 B.2		B.3		B.4	B.5	B.6	B.7			
	4 21-402-01			1.235.300	1.235.300	0	5	61.765		
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota										
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 046/SP2D-LS/BLUD-RSJDAHM/IV/2022										
Nama Dokui			ımen	en Biaya Pembayaran Tanggal 2 8 dd 0 4 mm 2 0 2 2 yyyy						
B.9	PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.									
	Nomor: Tanggal									
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :										
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :										
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK										
C.1 NPWP Instansi Pemerintah : 9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0										
			RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR							
C.3 ID Subunit Organisasi :										
C.4	4 Tanggal : 2 8		2 8	dd 0 4 mm	2 0 2 2 yyyy			_		
C.5	<u></u>		IUMADI							
				Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya andatangani secara elektronik.						
				dengan ketentuan yang nik sehingga tidak diperl	berlaku, Direktorat Jenderal Pajak ukan tanda tangan.	s mengatur bahwa (	dokumen ini tel	ah ditandatangani secara		